



Analisis Kebijakan Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Palangkaraya dalam Mendukung Pencapaian SDGs 1 dan SDGs 8

Acep Kurniawan ¹⁾; Daniel ²⁾; Andika Sanjaya ³⁾; Renno Sambawe ⁴⁾

^{1,2,3,4)} *Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Palangka Raya*

Email: ¹⁾ Kurniawan656@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [19 Mei 2026]

Revised [22 Juni 2026]

Accepted [26 Juni 2026]

KEYWORDS

Poverty, Public Policy, Sdgs, Community, Empowerment, Palangka Raya.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi perhatian pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan program pengentasan kemiskinan di Kota Palangka Raya dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui dokumentasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen pemerintah daerah, jurnal ilmiah, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Palangka Raya mengalami penurunan dari 3,70% pada tahun 2020 menjadi 3,52% pada tahun 2024. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya, ketimpangan akses ekonomi, dan lemahnya sistem monitoring program. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga serta peningkatan program pemberdayaan ekonomi agar kebijakan pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Poverty remains one of the major social issues that continues to receive attention from both central and regional governments. This study aims to analyze poverty alleviation policies implemented in Palangka Raya in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly SDGs 1 (No Poverty) and SDGs 8 (Decent Work and Economic Growth). This study employed a qualitative method with a descriptive and library research approach. Data were collected through documentation studies from the Central Statistics Agency (BPS), local government documents, scientific journals, and other relevant literature. The findings show that the poverty rate in Palangka Raya decreased from 3.70% in 2020 to 3.52% in 2024. The Urban Poverty Alleviation Program (P2KP) contributed to improving community welfare through business capital assistance, skills training, and community economic empowerment. However, the implementation of the program still faces several challenges, including limited resources, unequal economic access, and weak program monitoring systems. Therefore, stronger coordination among institutions and improvements in community empowerment programs are needed to ensure that poverty alleviation policies can be implemented more effectively and sustainably.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi perhatian utama pemerintah di berbagai daerah di Indonesia. Kondisi kemiskinan tidak hanya berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memengaruhi terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya merumuskan dan melaksanakan berbagai kebijakan serta program yang bertujuan untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Upaya pengentasan kemiskinan juga sejalan dengan komitmen global dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam agenda pembangunan berkelanjutan tersebut, terdapat dua tujuan yang berkaitan erat dengan isu kemiskinan, yaitu SDGs 1 (*No Poverty*) dan SDGs 8 (*Decent Work and Economic Growth*). Kedua tujuan tersebut menekankan pentingnya pengurangan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja yang layak, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Palangka Raya memiliki peran strategis dalam merancang dan melaksanakan berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan. Berbagai program telah dilakukan, seperti bantuan sosial, pemberdayaan usaha mikro, pelatihan keterampilan masyarakat, serta peningkatan akses terhadap

kesempatan kerja. Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan secara bertahap.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kota Palangka Raya menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, seperti keterbatasan lapangan kerja, ketimpangan akses ekonomi, dan belum optimalnya pemberdayaan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan masih memerlukan evaluasi agar program yang dijalankan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Evaluasi kebijakan menjadi penting untuk menilai tingkat keberhasilan program, mengidentifikasi berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan, serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mendukung pencapaian *SDGs* 1 dan *SDGs* 8. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan (Rachmatullah et al., 2021; Rais et al., 2025).

LANDASAN TEORI

Kebijakan Dan Analisis Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang diambil pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Menurut Thomas R. Dye (1992), kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan tindakan pemerintah, tetapi juga keputusan pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan.

Analisis kebijakan publik merupakan proses untuk menilai dan mengevaluasi kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Analisis kebijakan dilakukan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan telah berjalan secara efektif dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam penelitian ini, analisis kebijakan digunakan untuk mengevaluasi program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mendukung pencapaian *SDGs* 1 (Tanpa Kemiskinan) dan *SDGs* 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis kebijakan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mendukung pencapaian *SDGs*, khususnya tujuan pertama yaitu Tanpa Kemiskinan (*SDGs* 1) dan tujuan kedelapan yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*SDGs* 8). Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini berupaya menggambarkan secara sistematis berbagai kebijakan, program, serta implementasinya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Analisis dilakukan melalui identifikasi kebijakan dan program yang ada, kemudian mengevaluasi kesesuaiannya dengan indikator *SDGs*. Selanjutnya, implementasi kebijakan dianalisis untuk menilai efektivitas pelaksanaan, capaian program, serta faktor pendukung dan penghambat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis digunakan untuk menilai kontribusi kebijakan daerah terhadap pencapaian target *SDGs* serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan yang lebih efektif dan selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

Sumber pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan (*library research*). Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen, laporan, serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai dokumen seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, publikasi statistik, serta dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan.

Data tersebut kemudian dikaji dan dianalisis untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui teknik studi dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data yang valid dan relevan mengenai kebijakan pengentasan kemiskinan serta berbagai program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mendukung pencapaian *SDGs*. Sumber data yang digunakan



dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut meliputi jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan resmi pemerintah, publikasi statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan dan pencapaian *SDGs*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pendekatan deskriptif dan kepustakaan (*library research*) data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kota Palangka Raya menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, hal ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Analisis kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa Program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah daerah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan fasilitasi kewirausahaan berhasil memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dan meningkatkan kapasitas ekonomi lokal.

Pelaksanaan kebijakan ini menekankan pada pengembangan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pemberdayaan ekonomi yang inklusif. Strategi tersebut selaras dengan tujuan *SDGs*, yakni penghapusan kemiskinan secara menyeluruh dan penciptaan lapangan kerja yang layak serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Partisipasi aktif pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta menunjukkan adanya sinergi lintas sektor yang mendukung efektivitas program. Meskipun demikian, beberapa tantangan masih muncul, antara lain keterbatasan sumber daya, perbedaan akses antarwilayah, dan kebutuhan akan sistem monitoring yang lebih terintegrasi. Kendala tersebut menjadi perhatian penting dalam memastikan program-program pengentasan kemiskinan berjalan secara merata dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, kebijakan pengentasan kemiskinan di Palangka Raya mencerminkan integrasi antara pembangunan lokal dan tujuan global. Dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan akses sosial dan ekonomi, tetapi juga memperkuat fondasi untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas (Hompage et al., n.d.; Ridayanti et al., 2024).

Program pengentasan kemiskinan di Kota Palangka Raya dilaksanakan melalui Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat miskin. Program ini dilaksanakan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan ekonomi, penguatan kelembagaan masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam penelitian disebutkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam P2KP adalah pendekatan pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (Rahayu & Febriaty, n.d.).

Pelaksanaan program dilakukan melalui pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). BKM berperan sebagai pengelola dana bantuan masyarakat, sedangkan KSM menjadi kelompok penerima manfaat yang menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat diberikan akses bantuan modal usaha bergulir guna meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga miskin. Kebijakan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma pemerintah dari pendekatan bantuan sosial konsumtif menuju pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga mendorong masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi dan aktif dalam pembangunan lingkungan sosialnya (Nur Amalia & Agusalm, n.d.).

Berdasarkan publikasi BPS Kota Palangka Raya Tahun 2020 - 2024, persentase penduduk miskin di Kota Palangka Raya pada tahun 2020 tercatat sebesar 3,70 persen, kemudian menurun menjadi 3,69 persen pada tahun 2021, 3,63 persen pada tahun 2022, 3,58 persen pada tahun 2023, dan sekitar 3,52 persen pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah kota memiliki dampak terhadap pengurangan tingkat kemiskinan.

Table 1

No	Tahun	Presentase Penduduk Miskin
1	2020	3,70%
2	2021	3,69%
3	2022	3,63%
4	2023	3,58%
5	2024	3,52%

Sumber: Data Diolah, 2020-2024

Jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Tengah, tingkat kemiskinan di Kota Palangka Raya tergolong relatif lebih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi kota yang relatif lebih berkembang serta tersedianya berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang lebih baik dibandingkan wilayah pedesaan. Namun demikian, permasalahan kemiskinan tetap menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Hal ini karena kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan tingkat pendapatan masyarakat, tetapi juga dengan keterbatasan akses terhadap berbagai sumber daya ekonomi dan sosial seperti pendidikan, kesehatan, serta kesempatan kerja (Setiawan, 2023)

Analisis Kebijakan dalam Mendukung SDGs 1 (No Poverty)

SDGs 1 bertujuan menghapus kemiskinan dalam segala bentuk. Dalam konteks ini, program P2KP di Kota Palangka Raya memiliki relevansi yang kuat karena fokus utama program adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin perkotaan melalui kegiatan ekonomi produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh bantuan modal usaha melalui sistem pinjaman bergulir yang disalurkan oleh BKM kepada KSM ekonomi. Bantuan tersebut digunakan masyarakat untuk mengembangkan usaha kecil dan meningkatkan penghasilan keluarga. Program ini membantu masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal sehingga dapat memperoleh modal usaha dengan prosedur yang lebih mudah. Selain itu, kebijakan ini juga mendukung pengurangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas masyarakat. Program pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan pembelajaran sosial agar masyarakat mampu mengelola usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Kebijakan tersebut sesuai dengan konsep SDGs yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Palangka Raya masih berada pada tahap pemberdayaan dasar dan belum sepenuhnya mampu menciptakan transformasi ekonomi masyarakat miskin (Rochman et al., n.d.). Kebijakan lebih banyak berhasil dalam membangun solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat dibandingkan menciptakan peningkatan pendapatan yang signifikan.

Analisis Kebijakan terhadap Pencapaian SDGs 8 (Decent Work and Economic Growth)

SDGs 8 bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menciptakan pekerjaan yang layak. Program P2KP mendukung tujuan tersebut melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin dan pemberian akses terhadap modal usaha produktif. Program pinjaman bergulir yang diberikan kepada masyarakat mendorong terciptanya kegiatan ekonomi skala kecil seperti perdagangan, usaha rumah tangga, dan usaha mikro lainnya. Dengan adanya modal usaha, masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan produktivitas dan memperoleh sumber pendapatan yang lebih stabil.

Selain memberikan bantuan modal usaha, program ini juga mendorong peningkatan keterampilan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan usaha. Kegiatan tersebut membantu masyarakat mengembangkan usaha secara mandiri serta membuka peluang kerja baru di lingkungan masyarakat. Dengan berkembangnya usaha mikro dan kegiatan ekonomi lokal, program pengentasan kemiskinan tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih inklusif dan berkelanjutan. (Paradigma et al., 2014; Putri et al., n.d.)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kebijakan program pengentasan kemiskinan di Kota Palangka Raya telah memberikan dampak positif dalam membantu mencapai SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Tren penurunan persentase penduduk miskin di Kota Palangka Raya dapat dilihat selama periode 2020 hingga 2024. Penurunan jumlah orang miskin menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan daerah dan program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah salah satu kebijakan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Program ini memberikan bantuan modal usaha, memperkuat organisasi masyarakat, menawarkan pelatihan keterampilan, dan memberikan pendampingan dalam menjalankan usaha. Program ini dilaksanakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berfungsi untuk mengelola bantuan dan mengembangkan usaha ekonomi yang produktif bagi masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengubah cara pandangnya, dari pendekatan bantuan sosial



yang hanya bersifat konsumtif menjadi pendekatan yang lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi yang dapat bertahan dalam jangka panjang (Manjuradmin, +SLAMET+SANTOSO+(1-12), n.d.).

Untuk mendukung SDGs 1, program P2KP membantu orang-orang yang kurang mampu mendapatkan akses ke modal usaha dan kegiatan ekonomi yang menghasilkan, sehingga mereka bisa meningkatkan pendapatan keluarga. Program ini juga membantu masyarakat untuk lebih aktif dalam pembangunan sosial dan memperkuat rasa solidaritas di antara anggota masyarakat melalui kegiatan kelompok usaha bersama. Pelatihan dan bimbingan yang diberikan kepada masyarakat juga merupakan langkah penting untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan ekonomi orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Sementara itu, untuk mendukung SDGs 8, program P2KP dapat mendorong terbentuknya kegiatan ekonomi yang produktif yang berasal dari usaha kecil dan usaha rumah tangga. Bantuan modal usaha memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka dan menciptakan sumber penghasilan tambahan. Program ini juga menunjukkan adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih merata.

Walaupun demikian, pelaksanaan program masih mengalami beberapa masalah, seperti terbatasnya sumber daya, peningkatan pendapatan masyarakat yang belum maksimal, serta perlunya penguatan sistem pemantauan dan evaluasi program. Karena itu, perlu ada peningkatan dalam pelaksanaan program agar kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Palangka Raya bisa berjalan dengan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Palangka Raya diharapkan bisa meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan dengan memperkuat pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Pendampingan yang terus-menerus diperlukan supaya masyarakat yang menerima bantuan bisa mengelola usaha mereka dengan lebih produktif dan mandiri.

Pemerintah juga harus meningkatkan dukungan untuk pengembangan usaha masyarakat dengan menambah modal usaha, memberikan pelatihan kewirausahaan, serta memanfaatkan teknologi dan pemasaran digital. Dengan cara ini, hasil usaha masyarakat bisa menjadi lebih kompetitif. Dengan cara ini, program pengurangan kemiskinan tidak hanya mendukung masyarakat dalam waktu dekat, tetapi juga dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, perlu ada peningkatan kerja sama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan. Kerjasama antar sektor sangat penting untuk membuka lebih banyak peluang kerja, memperbaiki akses ke pasar, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat miskin. (Pranata & oleh Harapan Tua RFS, 2015; Trimulato & Syarifuddin, 2023)

Pemerintah daerah juga harus memperkuat sistem pemantauan dan penilaian program secara rutin agar pelaksanaan kebijakan bisa lebih tepat sasaran dan dapat menjangkau semua kelompok masyarakat yang membutuhkan. Evaluasi yang baik akan membantu pemerintah memahami kelemahan program, sehingga perbaikan kebijakan dapat dilakukan secara terus-menerus.

Dengan adanya perbaikan dalam kualitas pelaksanaan program dan kerja sama yang lebih baik antara berbagai pihak, diharapkan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Palangka Raya dapat memberikan hasil yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dye, T. R. (1992). *Understanding public policy* (7th ed.). Prentice Hall.
- Hompage, J., Bhayu Pratama, N., & Priyo Purnomo, E. (n.d.). SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. In 64 | SOSIOHUMANIORA (Vol. 6, Number 2). manjuradmin, +SLAMET+SANTOSO+(1-12). (n.d.).
- Nur Amalia, S., & Agusalm, L. (n.d.). *GENDER'S ROLE IN POVERTY ALLEVIATION: A CROSS-PROVINCIAL ANALYSIS IN INDONEIA*.
- Paradigma, R., Pengetahuan, I., Ekologis, U. K., & Kusmanto, T. Y. (2014). *REKONSTRUKSI PARADIGMA ILMU PENGETAHUAN UNTUK KEBERLANJUTAN EKOLOGIS* (Vol. 9, Number 1).

- Pranata, Y., & oleh Harapan Tua RFS, D. (2015). KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN SWASTA (STUDI KASUS PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA PEKANBARU). In *Jom FISIP* (Vol. 2, Number 1).
- Putri, E. P., Pratama, A., Choirunnisa, A., Septina, Z., & Setiyawati, M. E. (n.d.). *PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA*.
- Rachmatullah, R., Endaryanto, T., & Affandi, M. I. (2021). Pengarusutamaan Sustainable Development Goals (SDGs) Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Pagar Alam. *TATALOKA*, 23(2), 239–251. <https://doi.org/10.14710/tataloka.23.2.239-251>
- Rahayu, S. E., & Febriaty, H. (n.d.). *Upaya Pengentasan Kemiskinan Menuju Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia*.
- Rais, N. T., Furqan, A. C., Betty, B., & Usman, E. (2025). Empirical Study of Social Budget And Regional Wealth In Achieving SDG 1 (No Poverty) in Indonesia. *Owner*, 9(4), 3246–3257. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i4.2789>
- Ridayanti, A., Nugroho, A., & Candrakirana, R. (2024). Pengentasan Kemiskinan Melalui Metode Spasial Perkotaan Dalam Pengembangan Sustainable Development Goals (SDGs) Kota Surakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(2), 40–55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10470365>
- Rochman, S., Sapitri, S. D., Anggreini, P., Yuliani, S., Ilmu, P., Sosial, P., & Jakarta, U. N. (n.d.). *Peran Pendidikan Berkualitas dalam Memutus Kemiskinan untuk Mendukung SDGs di Indonesia*. Retrieved <https://jpion.org/index.php/jpi1503>Situswebjurnal:<https://jpion.org/index.php/jpi>
- Setiawan, F. (2023). ANALISIS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA. In *Tahun* (Vol. 9, Number 1). Jurnal Administrasi Publik.
- Trimulato, T., & Syarifuddin, S. (2023). The Role State Sukuk Instruments to Support Halal Industry. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.37985/benefit.v1i1.14>